

FSPMI Sulut Gelar Aksi Penolakan UU Cipta Kerja, Juga Minta Investigasi Pajak

- Federasi Serikat Metal Indonesia (FSPMI) wilayah (Sulut), menggelar aksi penolakan terhadap di depan kantor Sulut, Senin (13/3). Ada 11 tuntutan yang diajukan oleh massa aksi FSPMI, di mana selain penolakan UU Cipta Kerja, mereka juga menolak pengesahan RUU Kesehatan serta meminta agar DPR RI segera mengesahkan RUU Pembantu Rumah Tangga (RUU PRT). Tuntutan kami secara nasional jelas adalah menolak Undang-undang Cipta Kerja dan juga menolak pembayaran upah di bawah standar, ujar Koordinator aksi, Sanni Lungan. Menariknya, salah satu poin yang dijadikan poin aksi FSPMI kali ini menyasar tentang penerimaan pajak. Mereka menilai jika harus ada investigasi terhadap penerimaan pajak di Indonesia. "Kami minta agar dibentuk tim pencari fakta untuk investigasi forensik terkait penerimaan pajak di Ditjen Pajak Keuangan," teriak para pendemo. Massa aksi juga menyentil tentang kinerja Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sulut yang belum menyelesaikan permasalahan normatif yang terjadi. Mereka meminta agar pemerintah bisa berpihak kepada buruh dalam setiap kebijakan, sehingga tidak terjadi ketimpangan. Aksi dari FSPMI ini sendiri diterima oleh Komisi I dan Komisi IV DPRD Provinsi Sulut.